

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA KOMISI II DPR RI
DENGAN
MENTERI DALAM NEGERI
SENIN, 19 SEPTEMBER 2011**

Tahun Sidang	: 2011-2012
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: --
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Dalam Negeri
Hari/Tanggal	: Senin, 19 September 2011
Pukul	: 09.00 WIB - selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III)
Ketua Rapat	: Dr. H. Chairuman Harahap, SH., MH/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Arini Wijayanti, SH., MH/Kabag. Set Komisi II DPR RI
Acara	: Membahas Progress Penyelesaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan e-KTP serta masalah aktual lainnya
Kehadiran	: 30 dari 49 Anggota Komisi II DPR RI 19 orang izin

HADIR :

- | | |
|--|---------------------------------|
| ◆ Dr. H. Chairuman Harahap, SH.,MH | ◆ Drs. H. Murad U. Nasir, M.Si |
| ◆ Ganjar Pranowo | ◆ H. Rahadi Zakaria, S.IP.,MH |
| ◆ Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si | ◆ Arif Wibowo |
| ◆ H. Abdul Wahab Dalimunte, SH | ◆ Alexander Litaay |
| ◆ Khatibul Umam Wiranu, M.Hum | ◆ Dra. Eddy Mihati, M.Si |
| ◆ Gede Pasek Suardika, SH.,MH | ◆ Dr. Yasona H. Laoly, SH.,MH |
| ◆ Paula Sinjal, SH | ◆ Hermanto, SE.,MM |
| ◆ Drs. Ramadhan Pohan, MIS | ◆ Aus Hidayat Nur |
| ◆ Dra. Gray Koes Moertiyah, M.Pd | ◆ Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si |
| ◆ Ir. Nanang Samodra KA, M.Sc | ◆ Drs. H. Fauzan Syai'e |
| ◆ Nurul Arifin S.IP.,M.Si | ◆ Dr. AW. Thalib, M.Si |
| ◆ Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc IP.,M.Si | ◆ Drs. H. Akhmad Muqowam |
| ◆ Hj. Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus | ◆ Abdul Malik Haramain, M.Si |
| ◆ Dr. Hj. Mariani Akib Baramuli, MM | ◆ Dra. Hj. Ida Fauziyah |
| ◆ Drs. Taufiq Hidayat, M.Si | ◆ Drs. H. Harun Al-Rasyid, M.Si |

IZIN :

- | | |
|---|-----------------------------------|
| ◆ Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA | ◆ Zainun Ahmadi |
| ◆ Drs. H. Abdul Gafar Patappe | ◆ Drs. Almuzzamil Yusuf |
| ◆ Ignatius Mulyono | ◆ Agus Purnomo, S.IP |
| ◆ Drs. H. Djufri | ◆ TB. Soenmandjaja.SD |
| ◆ Sutjipto, SH.,M.Kn | ◆ H. Chairul Naim, M.Anik, SH.,MH |
| ◆ Rusminiati, SH | ◆ Drs. H. Nu'man Abdul Hakim |
| ◆ Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM | ◆ Mestariyany Habie, SH |
| ◆ Agustina Basik-Basik, S.Sos.,MM.,M.Pd | ◆ Miryam S. Haryani, SE.,M.Si |
| ◆ T. Gayus Lumbuun | ◆ Drs. Akbar Faizal, M.Si |
| ◆ Budiman Sudjatmiko, M.Sc.,M.Phill | |

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri dibuka pukul 10.20 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Dr. H. Chairuman Harahap, SH.,MH/F-PG

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

PENERBITAN DATA KEPENDUDUKAN SERTA PENERBITAN NIK SECARA NASIONAL TAHUN 2011

- Kementerian Dalam Negeri melaksanakan 3 (tiga) Program Strategis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil:
 1. Pemutakhiran Data Kependudukan di semua Kabupaten/Kota pada tahun 2010.
 2. Penerbitan NIK di 329 Kabupaten/Kota pada Tahun 2010 dan di 168 Kabupaten/Kota pada Tahun 2011
 3. Penerapan e-KTP di 197 Kabupaten/Kota pada Tahun 2011 dan di 300 Kabupaten/Kota pada Tahun 2012.
- Pelaksanaan Program Pemutakhiran Data Kependudukan sampai dengan akhir Tahun 2010, sebagai berikut :
 1. Jumlah Penduduk keseluruhan per 31 Desember 2010 adalah 259.940.857 Jiwa dengan rincian laki-laki 132.240.055 Jiwa dan perempuan 127.700.802 Jiwa.
 2. Telah ditemukan data ganda sebanyak 7.078.538 Jiwa, dikembalikan ke Kabupaten/Kota untuk dilakukan pengecekan keberadaan domisili penduduk tersebut.

PENERAPAN ELEKTRONIK KTP (e-KTP) SECARA NASIONAL TAHUN 2012

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penerapan KPT berbasis NIK Nasional, Kementerian Dalam Negeri atas persetujuan Komisi II DPR RI telah memprogramkan penerapan e-KTP dimulai pada Tahun 2011 dan ditargetkan selesai pada akhir 2012. Perkembangan persiapan dan pelaksanaan penerapan e-KTP:

a. Pelaksanaan Pelelangan

Pelelangan dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan saran KPK mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang dimulai pada tanggal 21 Februari 2011, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. HPS yang menjadi patokan harga dalam pelelangan disusun setelah mendapatkan perhitungan harga yang diperlukan untuk penerapan e-KTP dari berbagai prosedur (prinsipal) yang berkaitan dengan perangkat/sistem yang berkaitan dengan e-KTP
2. Nilai total HPS yang ditetapkan berada dibawah perhitungan harga dari semua prinsipal.
3. HPS sebelum ditetapkan telah diaudit terlebih dahulu oleh BPKP.
4. Spesifikasi teknis yang digunakan dalam pelelangan, disusun oleh Tim Teknis dari 15 Kementerian/Lembaga yang ditetapkan melalui Permendagri Nomor 6 Tahun 2011.
5. Pelelangan e-KTP dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa bersama Tim Teknis Teknologi Informasi dari BPPT, ITB, LSN, dan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, didampingi Tim BPKP dan Tim LKPP.

6. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, penawaran dilakukan 2 (dua) tahap, yakni : penawaran tahap I (Penawaran Administrasi dan Teknis) dan penawaran tahap II (penawaran harga). Yang lulus evaluasi administrasi dan teknis adalah 2 (dua) konsorsium (Astra Graphia dan PNRI) dari 11 (sebelas) konsorsium yang ikut lelang, dengan demikian yang berhak mengajukan penawaran harga hanya 2 (dua) konsorsium yang lulus administrasi dan teknis.
 7. Berdasarkan hasil evaluasi teknis dan harga maka yang menjadi pemenang lelang adalah Konsorsium PNRI dengan penawaran sebesar **Rp5.841.896.144.993,-** dengan nilai teknis 96,83
 8. Hasil audit BPKP terkait dengan proses lelang bahwa semua tahapan sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
- b. Pelaksanaan Penerapan e-KTP

Proses pelaksanaan penerapan e-KTP dimulai sejak ditanda tangani kontrak pada tanggal 1 Juli 2011, dengan perkembangan sebagai berikut:

1. Bimbingan teknis bagi tenaga pendamping operator e-KTP sudah dilaksanakan pada bulan Juli 2011.
2. Bimbingan teknis bagi tenaga operator e-KTP sudah dilaksanakan pada bulan Juli 2011.

Pengadaan perangkat, distribusi dan instalasi serta jaringan komunikasi data dengan perkembangan sebagai berikut:

1. Pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data pada Data Center Kependudukan sudah terpasang dan berfungsi dengan baik.
2. Untuk Provinsi DKI Jakarta pengadaan perangkat, distribusi dan instalasi yang menjadi kewajiban konsorsium berdasarkan kontrak hanya untuk 44 titik pelayanan (Kecamatan), untuk mengupayakan target e-KTP di DKI Jakarta bisa tercapai, pelayanan diperbanyak menjadi 276 titik pelayanan (Kelurahan), semua Kelurahan sudah terpasang perangkat dan jaringan komunikasi data.
3. Untuk diluar Provinsi DKI Jakarta perkembangannya sebagai berikut:
 - Sampai tanggal 18 September 2011, perangkat sudah didistribusikan sampai Kecamatan sejumlah 2.304 Kecamatan.
 - Perangkat terpasang di 127 Kabupaten/Kota dan 877 Kecamatan sudah diselesaikan pada tanggal 18 September 2011.
 - Dari 2304 Kecamatan yang ditargetkan Tahun 2011, sudah terpasang jaringan komunikasi data di 1.710 Kecamatan.
 - Pelayanan e-KTP sudah dilaksanakan pada 421 Kecamatan dalam 84 Kabupaten/Kota.
4. Pemasangan jaringan komunikasi data ditargetkan selesai pada akhir September 2011.

Kendala yang dihadapi dalam pendistribusian perangkat dan pemasangan jaringan antara lain, keterbatasan transportasi di daerah kepulauan, tertunda/terhentinya pendistribusian pada waktu libur panjang lebaran. Kendala teknis yang dihadapi, kelancaran penginstalan dan pelayanan operator daerah pada awal pelayanan, diatasi dengan kewajiban konsorsium menempatkan tenaga teknis disetiap kecamatan dan menempatkan 1 orang di Kabupaten/Kota sebagai koordinator.

ANGGARAN

Anggaran yang diserap dalam rangka pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Penerapan KTP berbasis NIK melalui aplikasi SIAK secara nasional mulai tahun 2003 hingga tahun 2010 sebesar Rp435.642.751.000,-, dengan rincian sebagai berikut:

- Tahun 2003 : Rp 53.066.258.000,-
- Tahun 2004 : Rp 3.625.177.000,-
- Tahun 2005 : Rp 3.997.464.000,-
- Tahun 2006 : Rp 70.318.649.000,-
- Tahun 2007 : Rp111.005.361.000,-
- Tahun 2008 : Rp 73.274.115.000,-
- Tahun 2009 : Rp 73.384.856.000,-
- Tahun 2010 : Rp 46.970.771.000,-

III. KESIMPULAN/PENUTUP

Setelah Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memberikan kesempatan kepada Pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI untuk menyampaikan pendapat/pandangannya serta saran dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Komisi II DPR RI menegaskan kembali kepada Kementerian Dalam Negeri untuk tetap menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya dalam melaksanakan Program Penerapan KTP berbasis NIK yang harus dilaksanakan paling lambat akhir Tahun 2011 dan program penerbitan e-KTP paling lambat akhir Tahun 2012, dan dalam menerapkan program tersebut Komisi II DPR RI akan melakukan pengawasan secara terus menerus agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.
2. Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan koordinasi secara intensif dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan pemutakhiran hasil data kependudukan sehingga diperoleh data yang akurat.
3. Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri untuk segera mencari solusi terkait berbagai permasalahan di daerah yang menyangkut faktor-faktor penghambat kelancaran penerapan e-KTP seperti persoalan keterbatasan SDM, kendala pendistribusian perangkat, pemasangan jaringan, kendala kelancaran penginstalan dan pelayanan operator di daerah serta kurangnya berbagai infrastruktur pendukung yang ada di daerah.

Rapat ditutup pukul 14.50 WIB.

**Jakarta, 19 SEPTEMBER 2011
PIMPINAN KOMISI II DPR RI
KETUA,**

**H. CHAIRUMAN HARAHAP, SH, MH
A-178**